

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fauzi, Akhmad. *Ekonomi Perikanan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- Pasolong, Harbani. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Partanto, Pius A., dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Siombo, Mahaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supriadi, dan Alimuddin. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wartono Hadie, Lies Emmawati Hadie, dan Agus Supangat. *Sistem Budidaya Ikan: Modul 1*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.
- Y. Krisnafi. *Optimasi Kapal Pengawas Perikanan di WPP-NRI 711*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2017.

JURNAL

- Agustin, Andriani Hikmah, Murti Wulandari, dan Abdul Amid Jalaludin. "Ancaman Terhadap Perairan Laut Natuna oleh Pelaku *Illegal fishing*." *Universitas Maritim Raja Ali Haji* 1, no. 1 (2020): 36.
- Aliyah, Putri Nur, Andy Usmina Wijaya, dan Fikri Hadi. "Penegakan Hukum *Illegal fishing* dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Lingkungan di Indonesia Guna Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum* 8, no. 1 (April 2024): 116.
- Budiyanti, Mauly Dini, dan Arfin Sudirman. "Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara." *Jurnal Hubungan Internasional* 13, no. 1 (2021): 45. <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/view/16593/8959>.
- Hapsari. "Analisis Kinerja Satker Pengawas Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu Sukabumi

- Jawa Barat." *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology* 2, no. 1 (2013): 95-103.
- Handoko, Wignyo. "Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan." *Jurnal Hukum Internasional*. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, 118.
- Inayati, Aisha. "Kerjasama Indonesia dan Interpol dalam Penanggulangan Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing." *Journal of International Relations* 5, no. 3 (2019): 467. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Judijanto, Loso, et al. *Perikanan*. Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2024.
- Kamaruddin, Kelik, dan Lukman Daris. "Peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Destructive Fishing." *Fishiana: Journal of Marine and Fisheries* 1, no. 1 (2022): 3.
- Manek, Bernadine Grace Alvania. "Strategi Pertahanan Udara Indonesia: Kasus Sengketa Laut Natuna Utara." *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Pertamina* XI, no. 2 (2024): 106.
- Mirza, Achmad M., Ade Irma Suryani Nasution, Yudhawira Bhaskara Sembiring, Moch. Jurianto, Rudiyanto, dan Panji Suwarno. "Peran PSDKP Lampulo dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus Destructive Fishing di Perairan Aceh pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9, no. 3 (Agustus 2021): 40.
- Nasution, Zulkarnain, Rinda Noviyanti, dan Jalil. "Strategi Pengawas Perikanan pada Stasiun PSDKP Belawan dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan." *Jurnal Techno-Fish* 8, no. 2 (Desember 2024): 190.
- Pandoe, Ridha Munawir Masly, Siswo Hadi Sumantri, Panji Suwarno, dan Widodo. "Strategi Pertahanan Sosial dalam Menangani Isu Perbatasan Laut Wilayah Indonesia Timur." *FOCUS: Journal of Social Studies* 5, no. 2 (Agustus 2024): 120. <https://doi.org/10.37010/fcs.v5i2.1623>.
- Ribka, E., dan T. Wangkar. "Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum." *Lex Privatum* 12, no. 2 (Juli 2023): 1.
- Sari, D. A. A. "Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (2019): 147.
- Saharuddin, Pangkerego, O. A., dan J. O. Sumampow. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009." *Lex Crimen* 10, no. 7 (2021): 60.

- Susanto, Sri Nur Hari. "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (September 2020): 430.
- Syahrul. "Tanggung Jawab Negara dalam Menangani Penangkapan Ikan secara Ilegal di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2025.
- Tiaraputri, A., dan Diana, L. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional." *Riau Law Journal* 2, no. 1 (2018): 129.
- Waleleng, Julia Rachel, Fernando J. M.M. Karisoh, dan Djoly A. Sualang. "Sanksi Hukum Pencurian Ikan oleh Nelayan Asing di Wilayah Perairan RI Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982." *Lex Privatum* 13, no. 3 (Maret 2024): 4.
- Wardana, N. K. "Pengerahan Kekuatan Laut Dalam Menghadapi Ancaman di Laut Natuna Utara." *Keamanan Maritim* 6, no. 2 (2020): 203.
- Wangke, Humphrey. "Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara." *Pusat Penelitian Politik* 12, no. 1/I (Januari 2020).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*.

SITUS INTERNET

- Antara. "KKP Tangkap Kapal Vietnam Curi Ikan di Perairan Natuna Utara." *Antaraneews.com*, 17 Februari 2025. Diakses 18 Februari 2025.

<https://www.antaranews.com/berita/4276071/kkp-tangkap-kapal-vietnam-curi-ikan-di-perairan-natuna-utara>.

BBC News Indonesia. "Peta Baru China: Mengapa Aksi China Menuai Kontroversi, dan Haruskah Indonesia Khawatir?" *BBC.com*, 1 September 2023. Diakses 16 April 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66668869>.

IDN Times. "13 Pengertian Administrasi Publik Menurut Para Ahli." *IDN Times*, 8 Mei 2025. Diakses 8 Mei 2025. <https://www.idntimes.com/life/education/seo-intern/pengertian-administrasi-publik-menurut-para-ahli-serta-ciri-cirinya>.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. "Giat Edukasi Sejak Dini Pengelolaan SDKP Berkelanjutan." Diakses 18 Februari 2025. https://dkp.kaltimprov.go.id/home/more_berita/103111120210001/Giat%20Edukasi%20Sejak%20Dini%20Pengelolaan%20SDKP%20Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. "Kolaborasi Indonesia-Australia Tekan *Illegal fishing* di Perbatasan." Diakses 18 Februari 2025. <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kolaborasi-indonesia-australia-tekan-illegal-fishing-di-perbatasan-E8rg.html>.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. "KKP Berhasil Selamatkan Rp31 Triliun Kerugian Negara dari *Illegal fishing*." Diakses 18 Februari 2025. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-berhasil-selamatkan-rp31-triliun-kerugian-negara-dari-illegal-fishing.html>.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. "Sosialisasi tentang Rencana Perpanjangan Alat Tangkap Cantrang." Diakses 17 Maret 2025. <https://pipp.kkp.go.id/berita/detail/sosialisasi-tentang-rencana-perpanjangan-alat-tangkap-cantrang>.